BAB IV

KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DALAM MENORMALISASI HUBUNGAN BILATERAL AMERIKA-VIETNAM

Pada era globalisasi, hampir semua negara tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dengan negara lain, sehingga diperlukan sebuah kerjasama luar negeri yang efektif, baik melalui organisasi internasional, kerjasama multilateral ataupun bilateral. Hal ini disebabkan karena kepentingan nasional suatu negara sifatnya adalah tidak terbatas, sedangkan sumber daya (*domestic environment*) yang dimiliki suatu negara sifatnya adalah terbatas. Proposisi ini ternyata juga berlaku sebagai kepentingan Amerika Serikat dalam menormalisasi hubungan bilateral dengan Vietnam.

Bagi Amerika Serikat, keberadaan Vietnam memiliki peranan yang penting dalam bidang politik maupun ekonomi. Hubungan kedua negara ini telah melalui serangkaian sejarah yang panjang dan berkaitan dengan agenda BTA (*Vietnam-America Bilateral Trade Agreement*), Amerika Serikat berupaya memproleh sebuah momentum untuk memperluas skema kerjasama dan kepentingan nasionalnya. Pada bab IV ini akan diuraikan lebih lanjut tentang kepentingan Amerika Serikat dalam menormalisasi hubungan bilateral dengan

Normlisasi hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Vietnam ternyata menjadi bagian dari kebijakan luar negeri negara adikuasa ini. Menurut mantan presiden Amerika Serikat Ronald Reagen menyatakan bahwa :[35]

> "*...Amerika Serikat memerlukan sebuah konsep yang jelas dan rasional untuk mengembangkan kesejahteraan bersama. Amerika Serikat tidak harus terpaku pada nasionalisme barat, namun juga kelompok negara miskin tidak hanya mewujudkan kepentingan dalam negeri, namun kepentingan bersama secara hakiki. Untuk itu, keyakinan sangat diperlukan bagi para pemimpin Amerika Serikat dalam menjalin kerjasama yang nantinya akan mencapai keuntungan bagi Amerika Serikat dan target kerjasama.*"

Pasca berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1991, Amerika Serikat memegang kekuasaan dan hegemoni dunia dengan sifat monoplar atau kekuatan adikuasa tunggal. Inilah yang mendasari negara ini untuk menjalankan tindakan-tindakan dan kebijakan luar negeri yang cenderung represif dan arogan. Inilah yang kemudian dapat dianggap sebagai bentuk politik *hard diplomacy* atau pola diplomasi yang dijalankan secara kaku, keras dan bersifat sepihak.[36]

Politik Luar Negeri Amerika Serikat didukung oleh anggaran nasional yang luar biasa besar, yaitu :[37]

a. Jangkauan global bidang perekonomian yang jumlahnya sebesar 14,3 triliun USD.

b. Jangkauan global bidang pertahanan yang jumlahnya sebesar 711 milyar USD.

---

[35] Gateh Myrlle and Timothy Bottom, *New US Foreign Policy Agenda : From Military to Economy Interest*, Palgraff Publishing, London-New York, 2008, hal.28-29.

Bagi Amerika Serikat Vietnam merupakan negara yang memiliki peranan penting bagi dinamika politik negara adikuasa ini. Sejak era perang dingin (*cold war*), Vietnam menjadi negara yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan komunisme dari Cina dan Uni Soviet. Kemudian seiring dengan berkembangnya waktu, isu tentang komunisme semakin menurun dan kemudian kasus ini dianggap sebagai momentum yang sesuai untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi dan HAM.

Berdasar pada paparan di atas maka dapat dipahami bahwa orientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat telah terbentuk secara jelas dan sistematis yang dipengaruhi gagasan-gagasan dari tokoh pendiri (*founding father*) Amerika Serikat. Kemudian pada kasus upaya pencapaian kepentingan pada bidang politik di Vietnam ternyata tidak lepas dari mengembangkan supremasi HAM dan demokrasi.

A. Upaya Amerika Serikat Menyebarkan Paham Demokrasi Di Vietnam

Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan oleh rakyat. Menurut kamus, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil wakil yang mereka pilih dibawah sistem

pemilihan bebas. Dalam ucapan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.[38]

Pada tahun 2001 *Communist Party of Vietnam* (CPV) memilih Nong Duc Manh sebagai pemimpin barunya. Pada tahun itu juga, Phan Van Khai dipilih sebagai perdana menteri dan Tran Duc Luong sebagai presiden. Perjanjian antara 3 orang yang berasal dari utara, selatan dan pusat ini menyebabkan kesetaraan dalam kepemimpinan regional yang tradisional. Pada bulan Mei 2002 saat pemilihan anggota legislatif kader Partai Komunis Vietnam memenangkan seluruh kursi parlemen. Pada Juli 2004, Tran Khue, seorang mantan akademis dituntut 19 bulan penjara karena dakwaan menyebarkan demokrasi dan merusak sebuah rumah yang terjadi pada tahun 2001. Tran dituduh melakukan kegiatan espionase karena membuat artikel kritik terhadap pemerintah dan mencoba menyuarakan reformasi politik.[39]

CPV adalah partai satu-satunya di Vietnam, negara mengontrol seluruh aspek kehidupan. Komite pusat CPV pembuat keputusan tertinggi di vietnam. 498 anggota dipilih setiap satu kali dalam lima tahun. Partai mengontrol tanah dan hanya mengizinkan kader CPV dan beberapa orang independen untuk ikut pemilu. NGO mengkritisi tentang seluruh aspek kehidupan yang diatur negara terutama tentang

---

[38] Budi Prayitno, Apakah Demokrasi Itu?, Terjemahan Laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Jakarta, 2001, hal.29.

[39] "[illegible] Vietnam Political System", diakses dari http://www.eastasiaforum.org, pada

pegawai pemerintah, korupsi dan in-efisiensi pemerintahan. Vietnam merupakan negara terkorup ke- 102 dari 146 negara.

Dominasi partai tunggal dan buruknya pencapaian *good governance* di Vietnam kemudian menjadi alasan bagi Amerika Serikat untuk menormalisasi hubungannya dengan negara ASEAN ini. Dalam menerapkan sistem pemerintahan yang demokrasi Amerika Serikat menjalin hubungan perdagangan bilateral dengan Vietnam. Melalui kerjasama perdagangan ini Amerika Serikat mengharapkan Pemerintah Vietnam untuk lebih terbuka pada sistem perekonomian negaranya. Dengan memberikan izin dan kesempatan bagi warga negaranya atau pihak swasta untuk dapat terlibat langsung dalam menjalankan perekonomian negaranya. Nantinya pada saat Vietnam telah berkembang sebagai negara yang lebih demokratis maka ini akan mendukung liberalisme dan kapitalisme yang diusung oleh Amerika Serikat dan berarti akan mendukung kepentingan naisonal negara ini.

Dalam mendukung pencapaian demokrasi di Vietnam, Amerika Serikat menerapkan beberapa strategi, yaitu:[40]

a. Mengedepankan fungsi konsulat dan diplomasi. Upaya ini diimplementasikan dengan memanfaatkan aktor-aktor diplomatik untuk dapat melobi pemerintah Vietnam dan para pemangku kepentingan lainnya untuk dapat mendekatkan diri dengan kedua

[40] William Bottom and Stephen Christhoporus, *US Foreign Policy : From Cold War and Global Politics* (Third Edition), Palgraff Publishing, London New York, 2010, hal 23-24.

pihak yang nantinya dapat mendukung pencapaian kepentingan kedua belah pihak.

b. Memberikan bantuan luar negeri ke Vietnam sebagai stimulus peningkatan kualitas hubungan bilateral kedua negara. Sejak tahun 2001 hingga 2010 Amerika Serikat telah mengalokasikan anggaran bantuan luar negeri melalui USAID (*United States Agency of International Development*) mencapai 128 juta USD sehingga melalui bantuan ini akan terbentuk sikap kesepahaman diantara kedua negara.

Melalui Perjanjian Perdagangan Bilateral Amerika Serikat dan Vietnam, sistem perekonomian Vietnam menjadi lebih terbuka. Kegiatan ekonomi Vietnam tidak lagi di bawah kontrol dan kendali penuh oleh para elit Partai Komunis Vietnam. Warga negara dan para pelaku ekonomi baik pihak swasta maupun elit kapitalis dapat terlibat secara bebas dalam menjalankan roda perekonomian di Vietnam. Investasi asing, kerjasama ekspor-impor, dan perusahaan-perusahaan multinasional Amerika Serikat banyak memenuhi dan memasuki pasar ekonomi Vietnam. Hal ini mendorong masyarakat Vietnam dapat terlibat secara langsung dalam pergerakkan sistem perekonomian negara. Serta menjadi pembuka jalan bagi pihak swasta dan individu untuk berpartisipasi dalam mengendalikan dan menjalankan sistem perpolitikan di Pemerintahan melalui bidang ekonomi. Dengan kata lain

kepada masyarakat Vietnam melalui perjanjian perdagangan bilateral antara Amerika Serikat dan Vietnam. Dimana semua kegiatan politik-ekonomi tidak lagi dikontrol dan dikuasai penuh oleh para elit Partai Komunis Vietnam.

Beberapa upaya dilakukan Amerika Serikat guna menyebarkan paham demokrasi di Vietnam melalui perjanjian perdagangan bilateral adalah dengan menjalin kerjasama ekspor-impor beberapa jenis komoditas unggulan dimasing-masing negaranya. Gambaran tentang ekspor-impor dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1 U.S-Vietnam Trade
(millions of dollars)

	U.S. Imports from Vietnam	U.S. Exports to Vietnam	Total Trade	Trade Balance
1994	50.5	172.2	222.7	121.7
2000	827.4	330.5	1,157.9	-496.9
2001	1,026.4	393.8	1,420.2	-632.6
2002	2,391.7	551.9	2,943.6	-1,839.8
2003	4,472.0	1,291.1[a]	5,763.1	-3,180.9
2004	5,161.1	1121.9	6,283.0	-4,039.2
Jan - Apr 2004	1,470.8	212.7	1,683.5	(1,258.1)
Jan - Apr 2005	1,920.7	275.5	2,196.2	(1,645.2)
Major Imports from Vietnam	clothing, frozen shrimp, footwear, wooden furniture, petroleum products, cashew nuts, coffee, travel bags			
Major Exports to Vietnam	aircraft, mining equipment, electronic machinery, steel wire, raw cotton, plastics			

Source: U.S. International Trade Commission. Data are for merchandise trade on a customs basis.

a. U.S. exports in 2003 include Vietnam Airlines' $700 million purchase of four

Perusahaan-perusahaan Multinasional Amerika Serikat banyak yang mengembangkan bisnisnya di Vietnam. Misalnya seperti Perusahaan Semikonduktor Intel, rumah busana Victoria's Secret, Perusahaan Internet Google, dan rumah makan cepat saji KFC, Burger King serta McDonalds mendirikan anak cabang perusahaannya di Vietnam.[41] Banyaknya Perusahaan Multinasional Amerika Serikat yang berkembang luas di Vietnam dapat menjadi jalan bagi Pemerintah Amerika Serikat untuk menekan paham komunisme yang sudah sejak lama mengakar kuat di Vietnam menjadi paham demokrasi yang lebih liberal.

Perjanjian Perdagangan Bilateral yang dilakukan oleh Amerika Serikat-Vietnam semakin membawa Vietnam pada kondisi masyarakat demokrasi melalui kelola pemerintahan yang menjadikan pasar sebagai pusat perbaikan dan kemajuan ekonomi, mensolidkan sistem hukum, dan mengintegrasikan usaha Vietnam dalam ekonomi global.

B. Amerika Serikat Membutuhkan Akses Baru Dalam Pemasaran Di Kawasan Asia Tenggara Khususnya Di Vietnam

Asia Tenggara merupakan suatu kawasan yang mencakup sepuluh negara, yakni Kamboja, Brunnei Darussalam, Timor Timur, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, serta

[41] "Politik Luar Negeri Vietnam dalam Tantangan Globalisasi", diakses dari http://go-one-

Vietnam. Kawasan regional ini terletak di bagian Tenggara Benua Asia, dengan Indocina, Semenanjung Malaka, serta Kepulauan Melayu yang berserak di sekitarnya. Asia Tenggara berbatasan dengan Cina di utara, Samudera Pasifik di sebelah timur, Samudera Hindia di selatan, serta India dan Teluk Bengal di sebelah barat. Kawasan ini megalami perjalanan historis serta dinamika yang panjang. Asia Tenggara juga merupakan suatu kawasan yang relatif strategis, baik dari sisi geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan geokultural, sehingga mempengaruhi kebijakan aktor-aktor lain secara signifikan, termasuk Amerika Serikat.

Asia Tenggara merupakan kawasan yang letaknya sangat strategis. Posisi Asia Tenggara tepat di persimpangan antara konsentrasi industri, teknologi dan kekuatan militer di Asia Timur Laut ke Utara, Sub-Kontinental dan sumber-sumber minyak di Timur Tengah ke Timur, dan Australia ke Selatan. Secara ekonomi Asia Tenggara merupakan wilayah perdagangan yang mempunyai potensi yang besar untuk Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang signifikan dan sifat masyarakat yang konsumtif, wilayah Asia Tenggara telah menjadi faktor pasar penting bagi produk-produk Amerika. Wilayah Asia Tenggara merupakan tempat investasi bagi Amerika. Akan tetapi dalam beberapa sektor, baik secara ekonomi, politik strategis Asia Tenggara tetap penting. Asia Tenggara merupakan pasar yang potensial bagi produk dan industri jasa, dan sebagai kawasan utama dari sumber

sumber daya alam yang penting, termasuk minyak dan gas alam. Salah satu sektor investasi penting lainnya di Asia Tenggara adalah sumber daya alam. Negara-negara ASEAN secara kolektif merupakan kawasan dengan sumber energi dan kekayaan alam dunia yang besar, seperti timah, tembaga, emas dan sumber-sumber yang dapat diperbaharui seperti karet, kopi serta kayu-kayuan. Hasil bumi seperti minyak dan gas juga terhitung dalam jumlah yang tidak sedikit. Posisi Asia Tenggara terbentang di persimpangan dua jalur laut terbesar di dunia. Yang pertama adalah Jalur Timur Barat, yaitu jalur yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik. Kedua adalah Jalur Utara ke Selatan, yang menghubungkan Kawasan Asia Timur dengan Australia dan Selandia Baru. Tiga "pintu masuk" kawasan Asia Tenggara yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok merupakan titik penting dalam sistem perdagangan dunia. Selat Malaka sendiri merupakan selat yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik, sekaligus sebagai jalur terpendek yang terletak diantara India, Cina dan Indonesia. Oleh karenanya selat ini dianggap sebagai "*chokepoints*" Asia.[42]

Kawasan Asia Tenggara memiliki posisi penting bagi Amerika Serikat baik secara politik maupun strategis. Pada saat ini, Amerika Serikat menguatkan hubungan dengan Asia Tenggara baik secara bilateral maupun multilateral. Hal ini disebabkan karena pertama, Asia

[42] [illegible]

Tenggara adalah kunci untuk memperluas pengaruh Amerika Serikat terutama dari persaingan Jepang dan Cina. Kedua, Asia Tenggara sangat strategis untuk kepentingan ekonomi dan keamanan, terutama karena kawasan ini menjadi jalur laut internasinal *Sea Lanes Of Communication* (SLOC). Perairan Asia Tenggara dilayari oleh kapal-kapal dagang dan tenker dengan nilai lebih dari US$ 350 milyar tiap tahunnya. Ketiga, Asia Tenggara yang berpenduduk sekitar 500 juta jiwa merupakan pasar yang sangat potensial bagi Amerika Serikat, bahkan menjadi area investasi.[43]

Asia Tenggara merupakan *partner* perdangangan kelima terbesar bagi Amerika Serikat. Meskipun Asia Tenggara sempat mengalami krisis perekonomian pada tahun 1997-1998, tetapi Amerika Serikat melihat Asia Tenggara masih dapat terus bertahan dan menyelesaikan krisis tersebut. Sehingga Asia Tenggara diyakini sebagai kawasan yang memiliki prospek jangka panjang bagi kepentingan ekonomi Amerika Serikat ke depan.

Maka dari itu Amerika Serikat sangat bersikukuh mengembangkan kekuatannya di Kawasan Asia Tenggara dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Diantaranya ada Negara Indonesia, Singapura, dan Malaysia yang tergabung dalam ASEAN menjalin hubungan bilateral dengan Amerika.

---

[43] Jose Dimantara, "Analisis Cina Di Asia Tenggara", diakses dari http://oscafas.wordpress.com/

Berkaca dari kerjasama bilateral yang sudah dilakukan Amerika Serikat kepada beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Singapura dan Malaysia mendapati perkembangan dan prospek ke depan yang masih sangat luas dan terbuka, Amerika Serikat memutuskan untuk menambah kekuatannya di kawasan Asia Tenggara dalam membuka akses baru dengan menjalin kembali hubungan bilateral bersama Vietnam. Walaupun terkadang beberapa kerjasama atau perjanjian yang telah di sepakati mengalami kemunduran tidak mengendorkan niat Amerika Serikat untuk menggandeng Vietnam sebagai mitra barunya dalam pemasaran di kawasan Asia Tenggara.

Di awal tahun 1990-an Vietnam masih dihadapkan pada ketebelakangan kemiskinan dan beberepa persoalan lainnya. Bagi Amerika Serikat kasus ini merupakan momentum yang sesuai untuk mendukung pembangunan di Vietnam, baik secara langsung ataupun melalui FDI (*Foregin Direct Investmemnt*) ataupun kiprah perusahaan multinasional. Meskipun pasca BTA kondisi perekonomian Vietnam belum menunjukkan kemajuan yang pesat, seperti halnya di negara-negara Asia Tenggara yang lain, misalnya Singapura dan Malaysia, namun Amerika Serikat tetap mempersepsikan bahwa pada jangka waktu yang lebih panjang, Vietnam akan dapat berkembang sebagai negara yang potensial.

Dalam konteks internasional, dalam rentang tahun 1986 hingga 2002, Vietnam juga masih masuk dalam negara yang berkategori negara

miskin berkembang. Hal ini sesuai dengan hasil survey lembaga perekonomian internasional yang dapat dilihat melalui Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2

Peringkat Perekonomian Vietnam Dalam Konteks Internasional

No	Organisasi	Survey	Peringkat
1.	Heritage Foundation (The Wall Street Journal)	Index of Economic Freedom	142 dari 157 negara
2.	The Economist	Worldwide Quality of Life Index	61 dari 111 negara
3.	Reporters Without Border	Worldwide Press Fredome Index	155 dari 167 negara
4.	United Nations Development Program	Human Development Index	109 dari 177 negara

Sumber : "*The International Ranking of Vietnam*", diakses dari http://www.state.org pada tanggal 15 Juli 2014.

Amerika Serikat merupakan negara yang berupaya mengembangkan hegemoni ekonominya di negara-negara dunia. Pada prinsipnya sasaran ataua target hubungan luar negeri Amerika Serikat dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk, yaitu :[44]

a. Negara-negara yang telah berhubungan dengan Amerika Serikat pasca perang dingin, dimana kelompok negara ini merupakan negara-negara barat.

[44] William Potter and Stephen Christhanopus, op.cit.

b. Negara-negara yang belum berhubungan dengan Amerika Serikat pasca perang dingin, antara lain Vietnam.

c. Negara-negara yang tidak berhubungan dengan Amerika Serikat pasca perang dingin, dimana kelompok negara ini merupakan negara-negara yang berseberangan dengan negara barat, antara lain Cina dan Rusia.

Keberadaan Vietnam sebagai negara yang belum memiliki hubungan dengan Amerika Serikat secara kuat kemudian menjadi momentum atau kesempatan bagi negara adikuasa ini untuk memperjuangkan kepentingan nasional pada bidang ekonomi. Strategi yang ditempuh adalah dengan mendukung eksistensi investasi asing luar negeri (*Foreign Direct Investment*), perusahaan multinasional (*Multinational Coperations*) bantuan luar negeri dan tawaran bantuan teknis. Sehingga akan lebih mudah memajukan Vietnam sebagai negara yang terbelakang, dibandingkan dengan kerjasama antara Amerika Serikat dengan negara-negara maju lainnya, antara lain Uni Eropa.

Pada tahun 1986, Vietnam berinisiatif melakukan pembaharuan kebijakan ekonomi atau Doi Moi. Kebijakan renovasi yang dilakukan itu terfokus pada sektor ekonomi, dimana Vietnam menyesuakan diri dengan perkembangan dunia internasional yang semakin mengarah ke demokrasi liberal, perdagangan bebas dan ekonomi pasar. Vietnam berusaha melihat keluar, ke arah dunia yang lebih positif. Vietnam

memperkenalkan reformasi ekonomi penting dengan elemen-elemen ekonomi pasar sebagai bagian dari paket reformasi ekonomi luas, kepemilikan swasta digenjot dalam bidang industri, perdagangan dan pertanian. Vietnam berhasil mencapai pertumbuhan GDP tahunan sebesar 8% dari tahun 1990 hingga 1997. Selama lebih dari satu dekade, GDP-nya terus tumbuh cukup besar dari tahun ke tahun. Pertumbuhan 6,9% pada tahun 2001, 7,0% pada tahun 2002, 7,3% pada tahun 2003, 7,7% pada tahun 2004, 8,4% pada tahun 2005, 8,2% pada tahun 2006, 8,5% pada tahun 2007, 6,18% pada tahun 2008; 5,3% pada tahun 2009; 6,78% pada tahun 2010; dan 5,89% pada tahun 2011. Pertumbuhan itu membuat Vietnam menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat kedua di dunia setelah China. Pada saat bersamaan, investasi asing tumbuh tiga kali lipat dan simpanan domestik tumbuh empat kali lipat.[45]

Vietnam memiliki persentasi tertinggi atas penggunaan lahan untuk kepentingan cocok tanam permanen. Selain beras, ekspor Vietnam yang signifikan adalah kopi, teh, karet dan produk-produk perikanan. Tetapi, peranan pertanian terhadap pemasukan ekonomi telah berkurang, akibat dari meningkatnya produksi sektor-sektor ekonomi lainnya.

[45] "Gambaran Ekonomi Vietnam", diakses dari http://www.informasi-vietnam.com/2012/10/gambaran-ekonomi-vietnam.html pada tanggal 29 Agustus 2014

Kemajuan Vietnam luar biasa. Geliat pembangunannya sangat tinggi, prospeknya juga sangat bagus. Manufaktur, teknologi informasi dan industri teknologi canggih membentuk bagian besar dan tumbuh dengan cepat daripada ekonomi nasional. Vietnam secara relatif adalah pemain baru dalam bisnis perminyakan, namun sekarang Vietnam menjadi produsen minyak terbesar ketiga di Asia Tenggara dengan nilai produksi 400.000 barel per hari. Vietnam adalah salah satu negara Asia yang memiliki kebijakan ekonomi paling terbuka; neraca perdagangan mencapai sekitar 160% GDP, lebih dari dua kali rasio yang dimiliki China dan lebih dari empat kali rasio India.[46]

Kesuksesan ekspor-impor membuka luas peluang kerjasama antara Amerika Serikat dan Vietnam di berbagai sektor ekonomi, misalnya: lahan investasi bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk mengeluarkan dananya dalam membangun bisnis di Vietnam. Semakin bertambahnya MNC (*Multinatinal Corporations*) di negara Vietnam. Tidak hanya di aspek ekonomi, kerjasama kedua negara terus mengalami peningkatkan di bidang pariwisata, budaya, pendidikan, kesehatan, maupun militer.

Amerika Serikat melihat perkembangan sosial-ekonomi Vietnam yang potensial. Doi Moi yang berorientasi pada keterbukaan (*Open Door Policy*) memberi dampak positif terhadap perekonomian

[46] "Ekspor Impor", diakses dari http://www.informasi-vietnam.com/2012/10/ekspor-impor.html

Vietnam. Walau pada tahun 1998 banyak negara-negara di kawasan Asia Tenggara mengalami krisis, namun Vietnam pada masa pemerintahan presiden Tran Duc Luong yang masih mempertahankan Kebijakan Doi Moi yang telah mengalami beberapa penyesuaian.

Amerika melihat Vietnam sebagai sebuah negara yang dapat berkembang pesat dan memenuhi kepentingan nasionalnya dalam membuka akses baru untuk pemasaran di wilayah Vietnam. Jumlah penduduk masyarakat Vietnam yang mencapai lebih dari 83 juta jiwa menyediakan banyak sumber daya manusia dan konsumen pasar. Pada tahun 2002 jumlah penduduk Vietnam mencapai 83.262.000 jiwa yang terbagi atas klasifikasi sebagai berikut :[47]

a. Usia 0-14 tahun sebesar 26,3 persen dengan perincian 11.617.000 laki-laki dan 10.784.000 perempuan.

b. Usia 15-64 tahun sebesar 67,9 persen dengan perincian 28.711.000 laki-laki dan 29.205.000 perempuan.

c. Usia diatas 65 tahun sebesar 5,8 persen dengan perincian 1.919.000 laki-laki dan 3.024.000 perempuan.

Dari total jumlah penduduk Vietnam yang berjumlah lebih dari 83 juta jiwa, hingga pada tahun 2002 rata-rata jumlah penduduk Vietnam yang berada dalam taraf kemiskinan adalah mencapai 42

[47] "*The People Populations of Vietnam* dalam *The Book of Fact*", diakses dari http://www.cia.goc, pada tanggal 15 Juli 2014.

persen. Dari 42 persen total penduduk Vietnam yang hidup dalam taraf kemiskinan hampir 60 persen hidup di wilayah pedesaan dan pinggiran kota-kota besar di Vietnam.

Berdasarkan informasi media *Dan Tri,* yang mengutip laporan Organisasi Tenaga Kerja Internasional (ILO), tingkat pengangguran di daerah urban Vietnam relatif tinggi, lebih dari 11% pada akhir 2013. Meskipun angkanya masih berada di bawah rata-rata global sebesar 13,1 % tapi hal ini cukup mengkhawatirkan Pemerintah Vietnam. Setidaknya 162.000 pemuda Vietnam yang pascasarjana gagal mendapatkan pekerjaan dalam kuartal pertama 2014. Dibandingkan kuartal keempat 2013, jumlah tersebut telah meningkat sebanyak 4.000 orang.[48] Gambaran tentang tingkat pengangguran di Vietnam dapat dilihat melalui Tabel 4.3 sebagai berikut:[49]

---

[48] "Tingkat Pengangguran di Kalangan Pemuda Vietnam Mengkhawatirkan", diakses dari microsite.metrotvnews.com pada tanggal 31 Agustus 2014.

[49] [illegible]

Tabel 4.3 Tingkat Pengangguran Vietnam

(persen)

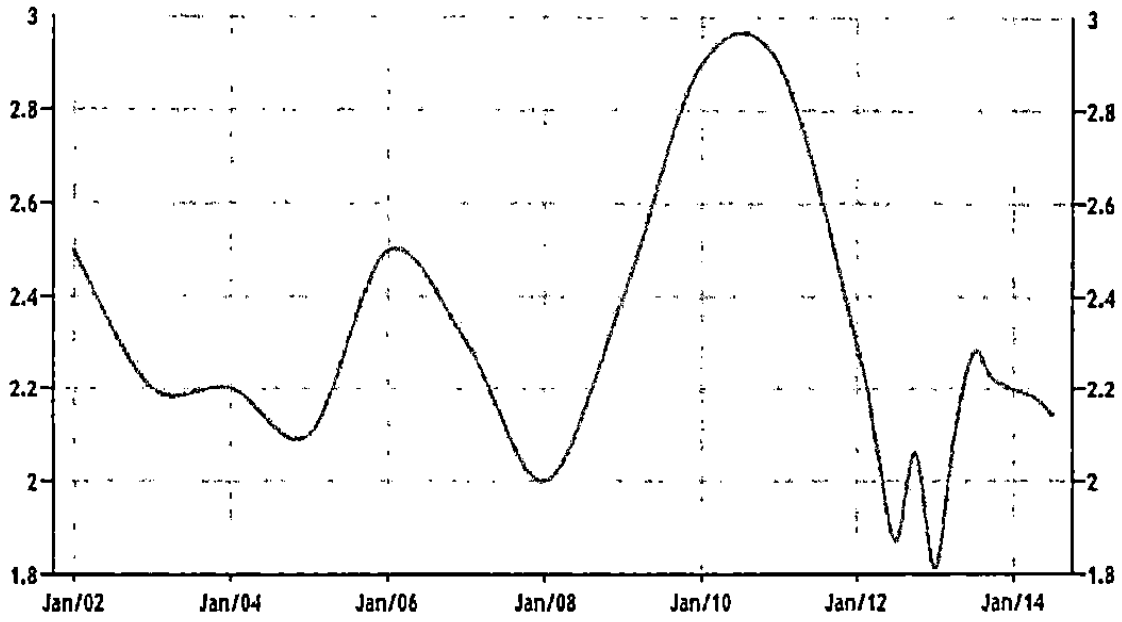

Banyaknya jumlah penduduk di Negara Vietnam menyediakan sumber daya manusia yang melimpah menimbulkan angka pengangguran yang cukup mengkhawatirkan Pemerintah Vietnam. Melimpahnya tenaga kerja di Vietnam ini memudahkan para pengusaha dari Amerika Serikat untuk mendapatkan sumber tenaga kerja dengan upah yang relatif rendah. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Vietnam dan tingginya angka pengangguran yang ada di Vietnam membuat persaingan antara buruh semakin meningkat yang menyebabkan murahnya tenaga kerja di Vietnam. Hal ini mendorong para pelaku usaha Amerika Serikat untuk berbondong-bondong membuka perusahaannya di Vietnam dengan tujuan agar mendapatkan

tenaga kerja dengan upah yang murah. Dengan demikian perusahaan-perusahaan tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal.

Seperti yang dilansir dari Liputan6.com, Kepala Badan Pengkajian Kebijakan dan Mutu Industri (BPKIMI) Kementerian Perindustrian, Arryanto Sagala mengatakan, jika dibandingkan dengan tenaga kerja asal Vietnam, upah tenaga kerja di Indonesia jauh lebih tinggi. Namun justru produktivitas tenaga kerja asal Vietnam ini jauh lebih baik. Pernyataan Arryanto dalam Workshop Pendalaman Kebijakan Industri di Bali menyebutkan bahwa tenaga kerja Vietnam pada sektor garmen misalnya bisa menghasilkan 8 celana per hari dengan 44 jam kerja per minggu dengan bayaran sekitar US$ 65. Sedangkan buruh Indonesia hanya mampu menghasilkan 6 celana per hari dengan waktu kerja 40 jam per minggu meminta upah di atas US$ 220.[50]

[50] "Upah Rendah di Vietnam, Ancam Tenaga Kerja Indonesia", diakses dari bisnis.liputan6.com

Berikut ini perbandingan upah minimum di Negara-negara Asia dapat dilihat pada Tabel 4.4 di bawah ini:[51]

Table 4.4 Perbandingan Upah Buruh di Asia

No.	Negara	Upah Minimum	Upah Maksimum
1.	Jepang	Rp. 16.386.009	Rp. 21.263.618
2.	Korea Selatan	-	Rp. 10.431.410
3.	Hongkong	-	Rp. 8.420.330
4.	Taiwan	-	Rp. 5.852.042
5.	Filipina	Rp. 2.990.957	Rp. 3.255.076
6.	Thailand	Rp. 2.167.491	Rp. 2.818.409
7.	China	-	Rp. 2.522.672
8.	Indonesia	Rp. 830.756	Rp. 2.200.639
9.	Vietnam	Rp. 646.349	Rp. 923.300
10.	Kamboja	-	Rp. 592.981

Dari perbandingan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa upah buruh di Vietnam masih sangat relatif rendah. Tak heran jika Vietnam menjadi incaran para investor asing termasuk investor dari Amerika Serikat untuk menanamkan modal dan membangun perusahaannya di

[51] "Perbandingan Upah Buruh di Asia", diakses dari http://daftarcaii.blogspot.com pada tanggal 31

Vietnam karena tenaga kerjanya yang sangat murah yaitu, sekitar US$ 0,39 atau setara Rp 3.808 per jam.[52]

Selain itu, peningkatan jumlah populasi di Vietnam terutama generasi muda berpotensi mendorong tingkat konsumsi domestik. Kondisi tersebut menjadi daya tarik bagi Amerika Serikat untuk menanamkan modalnya ke negara di kawasan Asia Tenggara itu. Data dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Amerika Serikat di Vietnam menyebutkan, rata-rata pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) Vietnam sejak 1990 hingga 2009 mencapai 7,1 persen. Saat ini populasi penduduk di Vietnam diperkirakan sebesar ±87 juta jiwa, sekitar 50 persen di antaranya berusia di bawah 30 tahun.[53] Dimana usia tersebut masih mempunyai perilaku konsumtifitas yang tinggi. Modernisasi yang mempengaruhi gaya hidup masyarakat Vietnam juga menyebabkan tingkat konsumsi di Vietnam menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan peluang bagi Amerika Serikat untuk memasarkan produk-produk domestiknya ke Vietnam.

Salah satu contoh gaya hidup baru masyarakat Vietnam dapat terlihat disalah satu kota maju Vietnam, Ho Chi Minh City. Sejumlah pusat perbelanjaan atau mall-mall baru terus dibangun. Masyarakat Vietnam yang menengah ke atas terus meningkatkan status sosialnya

---

[52] "Sepuluh Negara dengan Upah Pekerja Termurah di Dunia", diakses dari http://suarapengusaha.com pada tanggal 31 Agustus 2014.

[53] "Vietnam Jadi Bidikan Investor Asing", diakses dari https://id-id.facebook.com/notes/koran-jakarta/vietnam-jadi-bidikan-investor-asing/ pada tanggal 31 Agustus 2014.

dengan mengikuti tren yang sedang berkembang. Salah satu tren yang sedang berkembang di masyarakat Vietnam adalah budaya barat. Dimana warga lokal lebih senang menghabiskan waktunya di kafe atau rumah makan cepat saji hanya untuk sekedar bersenang-senang, makan, minum kopi, atau bahkan mengadakan pertemuan rapat. Seperti misalnya makan di KFC, Burger King atau McD; bersantai sambil minum-minum kopi di Starbucks.[54]

Selain itu, kebiasaan mengkonsumsi minuman bersoda juga telah popular di masyarakat Vietnam. Saat mengadakan pesta, ketika berpergian, atau bahkan di sekolah warga Vietnam banyak yang mengkonsumsi minuman bersoda. Hal ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari orang Vietnam. Menurut Sesto Vecchi dari data resmi Kamar Dagang Amerika Serikat menunjukkan bahwa masyarakat Vietnam mengkonsumsi hampir satu miliar liter minuman ringan pada tahun 2013.[55]

Peningkatan angka konsumsi masyarakat Vietnam yang telah dipengaruhi oleh modernisasi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor asing untuk berinvestasi di Vietnam. Berdasarkan data statistik yang diumumkan oleh Biro Statistik Nasional Vietnam, dari Januari hingga September tahun 2014, jumlah total perjanjian investasi di

---

[54] "Gaya Hidup Warga Ho Chi Minh", diakses dari joybodyinside.blogspot.com pada tanggal 31 Agustus 2014.

[55] "Perdebatan Pemberlakuan Pajak Minuman Bersoda di Vietnam", diakses dari

Vietnam telah mencapai US$ 15 miliar, meningkat 36 persen dibandingkan tahun lalu. Jumlah investasi asing yang telah digunakan mencapai US$ 8,6 miliar, meningkat 6,4 persen dibandingkan tahun lalu. Pada tahun 2012, Produk Domestik Bruto per kapita Vietnam adalah US$ 1.540, masih berada dalam tahap pertama industrilisasi, permintaan terhadap modal asing sangat besar. Populasi Vietnam yang hampir mencapai 90 juta orang, di antaranya jumlah penduduk dengan usia antara 10 sampai 17 tahun mencapai 17 juta orang, ini berarti akan meningkat 1,7 juta konsumen setiap tahun dalam 10 tahun mendatang.[56] Permintaan konsumsi muda-mudi dengan jumlah yang sangat besar terhadap industri hiburan, produk eletronik dan informasi akan mendorong potensi pasar dalam negeri Vietnam.

Dalam bidang investasi modal asing, pemerintah selalu bersikap positif, dan mengambil serangkaian kebijakan merangsang, termasuk penurunan pajak, penurunan standar perizinan masuk, dan menyedikan banyak kemudahan. Vietnam telah mengganti Undang-Undang Investasi Asing dengan Undang-Undang Investasi pada tahun 2005. Dengan demikian, modal asing dan dalam negeri akan menikmati perlakuan yang sama. Vietnam juga akan memperbaiki Undang-Undang Perusahaan, agar lebih dapat memberikan kemudahan pada proses

[56] "Daya Tarik Terhadap Modal Investasi Asing Vietnam Semakin Meningkat", diakses dari http://indonesian.cri.cn/ pada tanggal 31 Agustus 2014.

administrasi perusahaan modal asing. Berikut ini Tabel 4.5 mengenai penanam modal asing di Vietnam.[57]

Tabel 4.5 Penanaman Modal Asing Di Vietnam

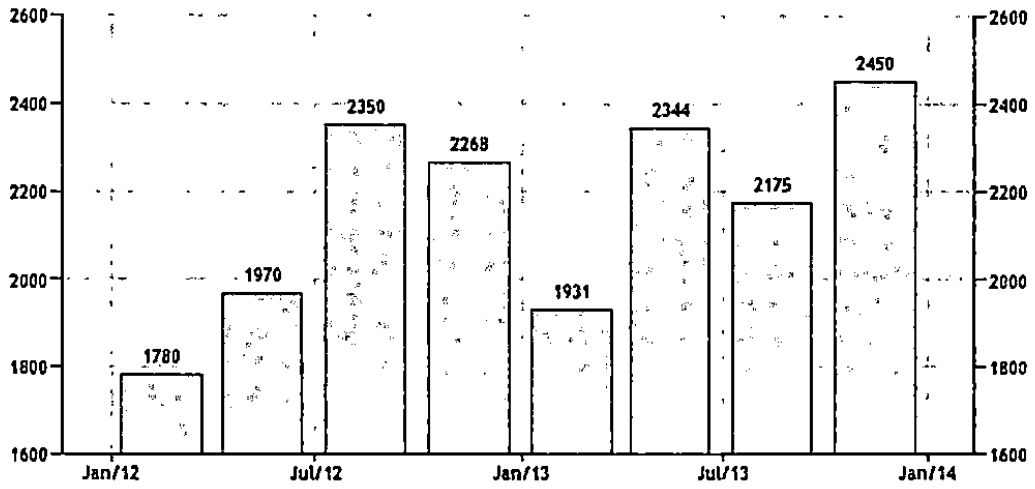

Pertumbuhan ekonomi yang potensial kemudian menjadi momentum dan kesempatan bagi Amerika Serikat untuk memperjuangkan kepentingan nasional pada bidang ekonomi. Melalui Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Vietnam, Amerika Serikat membuka akses baru bagi pemasaran produknya di Vietnam. Strategi yang ditempuh adalah dengan mendukung eksistensi investasi asing luar negeri (*Foreign Direct Investment*), perusahaan multinasional (*Multinational Corperations*) bantuan luar negeri dan tawaran bantuan teknis. Nantinya penetrasi aktor-aktor swasta tersebut akan memberikan kemajuan bagi Vietnam pada jangka pendek (*short period interest*) dan bagi Amerika Serikat pada jangka panjang (*continuing interest*)

[57] "Vietnam Penanaman Modal Asing 2014", diakses dari http://id.tradingeconomics.com pada